BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari laporan ini berisi mengenai Implementasi Kebijakan PNPM di Desa Cibening yang fokus saya pelajari dan teliti bagaimana pengimplementasiannya.

Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), sudah sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan – ketentuan dan indikator yang dibuat oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan. Hal ini terbukti dari proses sosialisasi, verifikasi, pengelompokan dan pengembangan yang berjalan sesuai dengan jadwal waktu *(Time Schedule)* yang dibuat oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan untuk beberapa kelompok yang sedang berproses.

Sebagaimana dengan teori Edward III yang saya kutip sebagai grand teori dalam penyusunan laporan ini yaitu ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi itu memang sangat berpengaruh dalam Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri di Desa Cibening ini.

1. Desa Cibening Mengimplementasikan Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta ini sudah baik, namun masih banyaknya kekurangan, seperti dalam hal komunikasi ini, koordinasi diantara pihak-pihak seperti masyarakat, Kecamatan khususnya bidang PNPM, dan Pihak-pihak lain yang terlibat untuk melaksanakan kebijakan ini belum seluruhnya berjalan dan terhubung dengan baik. Dengan begitu Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Cibening ini masih terus banyak kekurangan dan kesalahan diberbagai tingkatan. Untuk memperbaiki dan menjadikan kebijakan ini berjalan dengan

baik dan sukses, menurut saya Kecamatan Desa Cibening perlu banyak perbaikan dalam masalah komunikasi dan koordinasi.

2. Dari segi Sumber Daya anggaran dan peralatan, Desa Cibening sudah terpenuhi dan cukup menurut saya. Anggaran yang diberikan langsung oleh pemerintah Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat menurut saya sudah sangat cukup untuk Mengimplementasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Cibening ini dengan maksimal. Dengan anggaran yang ada, sumber daya peralatan juga dimiliki dengan cukup lengkap oleh Kecamatan Desa Cibening untuk Mengimplementasikan Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Desa Cibening.

   Sumber Daya dalam tujuan dan ketentuan kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) terlihat sangat baik, penyusun memperhatikan ketika pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor Kelurahan Cibening Kabupaten Purwakarta, antusias dari pada sumber daya manusia atau masyarakatnya sangat tinggi dengan melihat ketika pensosialisasian tujuan dan ketentuan terhadap kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP), namun untuk sumber daya finansialnya masih dalam bentuk wacana dan belum jelas jadi penyusun hanya bisa melihat sumber daya manusia / masyarakatnya saja.

3. Disposisi pada Mekanisme Pengelolaan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) di Desa Cibening bila dilihat dan dirasakan oleh penyusun saat penyusun melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Kantor Desa Dibening Kabupaten Purwakarta, Disposisi mekanismenya masih jauh dari harapan, salah satu contohnya dapat dilihat dari masih sedikitnya para implementator Kelurahan dan PNPM Mandiri Pedesaan Cibening yang dapat memanfaatkan peran teknologi saat ini seperti mengoprasikan

perangkat Komputer dan In Focus yang telah tersedia, hanya satu atau dua orang saja para implementator yang dapat mengoprasikanya, hal tersebut tentunya menjadi hambatan akan mekanisme dalam pengelolaan kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP).

4. Dan dari segi struktur birokrasi dalam hal ini Kecamatan Desa Cibening sebagai salah satu instansi yang menjalankan program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat menurut saya sifat dan ciri-ciri tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi instansi tersebut. Pelaksanaan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Cibening belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kinerja pegawai Kecamatan Desa Cibening yang kurang baik, mereka menurut saya masih lamban dan terlalu santai dalam mengerjakan segala hal. Dengan kinerja yang demikian wajar apabila program tersebut belum berjalan dengan maksimal.

   Struktur Birokrasi Ketentuan Pendanaan BLM di Desa cibening terlihat kurang baik, penyusun melihat ketika sedang melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kelurahan dan PNPM Mandiri Pedesaan tersebut, struktur birokrasinya terlalu rumit dan kompleks sehingga masyarakat sulit dalam sebuah hubungan dengan pihak terkait.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM. Dalam memeberikan palayanannya kepada masyarakat Desa Cibening.

- Adapun sedikit hambatan dalam Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kelurahan Cibening adalah keterbatasan masyarakat dalam memahami beberapa Mekanisme Pengelolaan yang didasari oleh :

- Beberapa masyarakat kurang mengertiakan Bahasa yang disampaikan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan yang sangat struktural.
- Keterbatasan pendidikan masyarakat, sedikit menjadi hambatan untuk memahami tentang Mekanisme Pencairan dana karena itu berhubungan dengan pengakalkulasian nominal.

4.2 Saran

Saran – saran yang penulis ajukan sehubungan dengan Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), pihak PNPM Mandiri Pedesaan seharusnya memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Komunikasi, Pihak PNPM Mandiri Pedesaan dengan pihak kelurahan hendaknya bekerja sama dalam mengupayakan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) ini lebih menyeluruh pada seluruh kalangan masyarakat terutama masyarakat miskin / tidak mampu agar kinerja kegiatan sesuai dengan tujuan – tujuan dari pihak PNPM Mandiri Pedesaan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).
2. Sumber Daya, Pihak PNPM Mandiri Pedesaan hendaknya mempermudah jalur / proses verifikasi dengan bertujuan untuk memperlancar proses tersebut.
3. Disposisi, Pihak Pemerintahan Desa Cibening harus memperbaiki semua pegawai supaya bisa mengoprasikan alat-alat elektronik supaya bisa menggunakan alat-alat elektronik.
4. Struktur Birokrasi, pemimpin Desa Cibening harus meninjau kembali para pegawainya supaya bisa dapat menjadi di siplin dalam memproses program PNPM khusnya program SPP.

Jika faktor-faktor yang penting tersebut dapat diperbaiki, dibenahi, dan dimaksimalkan saya yakin kebijakan pemerintah melalui program

PNPM di Desa Cibening ini akan berjalan dengan baik, maksimal dan sangat lancar.